

PENERAPAN KONSEP *BLUE ECONOMY* PADA BUDIDAYA UDANG VANAME MELALUI PEMETAAN *STAKEHOLDER* DI KECAMATAN RAWAJITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG

APPLICATION OF THE *BLUE ECONOMY* CONCEPT TO VANNAMEI SHRIMP CULTURE THROUGH *STAKEHOLDER* MAPPING IN EAST RAWAJITU DISTRICT, TULANG BAWANG REGENCY

Risa Ristiawati¹, Abdullah Aman Damai^{1,2}, Erna Rochana^{1,3},
Indra Gumay Febryano^{1,4,6,7}, Maya Riantini^{1,5}, Novita Tresiana^{1,8}

¹Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut, Pascasarjana, Universitas Lampung

²Jurusan Perikanan dan Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

³Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

⁴Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

⁵Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

⁶Magister Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

⁷Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Lampung

⁸Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, Indonesia

Email: indra.gumay@fp.unila.ac.id

Abstrak

Relevansi *blue economy* sangat signifikan dalam keberlanjutan pengelolaan budidaya tambak di pesisir Kecamatan Rawajitu Timur maka penting untuk memetakan keberadaan berbagai *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan kawasan tambak. Keberhasilan penerapan *blue economy* diperkirakan sangat tergantung pada peran *stakeholder*. Tujuan penelitian ini untuk memetakan *stakeholder* yang terlibat dalam upaya penerapan konsep *blue economy* pada budidaya udang vaname di Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memetakan *stakeholder* yang terlibat berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 21 *stakeholder* yang berperan terdiri dari pemerintah swasta, masyarakat dan akademisi. *Stakeholder* yang berperan sebagai *players* adalah Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang, yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang sangat kuat. *Stakeholder* yang berperan sebagai *context setter* yaitu Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komisi IV DPR RI, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Lembaga Sertifikasi INDOGAP, *Supplier* Benur, *Buyer* Udang, Perusahaan Pakan dan Obat-obatan, P3UWL, KPBD, Yagasu, PPNI, LPMUKP, Perguruan Tinggi memiliki pengaruh yang besar tetapi kepentingan yang rendah. Peran *stakeholder* dengan kategori *subject* adalah pembudidaya udang yang memiliki kepentingan yang tinggi, tetapi tidak memiliki pengaruh yang kuat. *Stakeholder crowd* terdiri dari Pemerintah Kecamatan Rawajitu Timur. Kerjasama lintas sektoral harus dilakukan, agar harapan dari pemerintah terhadap penerapan konsep *blue economy* atau budidaya udang berkelanjutan dapat diterapkan dalam menjaga lingkungan dengan tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pelatihan cara-cara pengolahan limbah sisa hasil budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, sehingga kegiatan budidaya udang vaname dapat *zero waste*.

Kata kunci : kawasan tambak, *stakeholder*, *blue economy*, budidaya udang

Abstract

The relevance of the *blue economy* is very significant in the sustainability of aquaculture management on the coast of East Rawajitu District, so it is important to map the existence of various stakeholders involved

Diterima 10 Februari 2024; Disetujui 25 April 2024

DOI: <https://doi.org/10.33019/jour.trop.mar.sci.v7i2.5002>

*corresponding author © Ilmu Kelautan, Universitas Bangka Belitung

<https://journal.ubb.ac.id/index.php/jtms>

in the management of the pond area. The successful implementation of the blue economy is expected to be highly dependent on the role of stakeholders. The purpose of this study was to map the stakeholders involved in efforts to implement the concept of blue economy in vaname shrimp farming in East Rawajitu District, Tulang Bawang Regency. Data were collected using a qualitative approach through in-depth interviews and documentation studies. Data analysis was carried out descriptively to map the stakeholders involved based on their importance and influence. The results showed that there were 21 stakeholders who played a role consisting of private government, community and academics. Stakeholders who play a role as players are the Lampung Provincial Government, the Maritime and Fisheries Service, the Tulang Bawang Regency Government, the Tulang Bawang Regency Fisheries Service, which has a very strong interest and influence. Stakeholders who act as context setters are the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Ministry of Environment and Forestry, Commission IV of the House of Representatives, Lampung Marine Aquaculture Center, Mesuji Sekampung River Basin, Fish Quarantine Center for Quality Control and Safety of Fishery Products, INDOGAP Certification Institute, Seed Supplier, Shrimp Buyer, Feed and Medicine Company, P3UWL, KPBD, Yagasu, PPNI, LPMUKP, Universities have a large influence but low importance. The role of stakeholders with the subject category is shrimp farmers who have a high interest, but do not have a strong influence. Crowd stakeholders consist of the East Rawajitu District Government. Cross-sectoral cooperation must be carried out, so that the expectations of the government towards the application of the concept of blue economy or sustainable shrimp farming can be applied in protecting the environment while still increasing economic growth. In addition, community empowerment can be carried out through training on ways to process residual cultivation waste that can be used as organic fertilizer, so that vaname shrimp farming activities can be zero waste

Keywords : pond area, stakeholders, blue economy, shrimp farming

PENDAHULUAN

Konsep blue economy merupakan pemahaman baru yang berupaya untuk menjamin kelestarian sumber daya dan lingkungan pesisir dan laut serta mendorong pertumbuhan ekonomi (Prayuda & Sary, 2019). Konsep blue economy berlandaskan pada integrasi tiga pilar yaitu pilar ekosistem, ekonomi dan sosial. Konsep blue economy mulai dicoba untuk diterapkan di Indonesia pada tahun 2013. Pendekatan ekosistem menjadi penting untuk diterapkan dalam pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan dan perlindungan ekosistem pesisir. Konsep blue economy bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Pendekatan pembangunan berbasis blue economy akan bersinergi dengan pelaksanaan triple track strategy salah satunya pro-environment (melestarikan lingkungan) (Purbani et al., 2016).

Pembangunan ekonomi dengan model ekonomi biru diharapkan dapat menjamin keberlanjutan ketersediaan sumberdaya, keseimbangan ekosistem dan kesehatan lingkungan, serta mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang efektif (Rani, 2015). Pada penerapannya memerlukan komitmen dari pemerintah yaitu adanya mekanisme koordinasi dari pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah, koordinasi antar sektor, dan hubungan antar regulasi yang ada (Cochrane, 2002 dalam Departemen Kelautan 2013).

Salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki potensi perikanan budidaya yang sangat besar yaitu Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Tulang Bawang memiliki Panjang garis pantai 51,9 Km di sepanjang pantai timur Tulang Bawang, potensi ini dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya udang vaname dipertambahkan (Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang, 2022). Produksi Udang Vaname di Rawajitu Timur Pada tahun 2022 mengalami penurunan 6.286 Ton dari 16.209 Ton tahun 2021 menjadi 9.923 Ton. Penurunan produksi disebabkan oleh sistem budidaya yang sebagian besar tidak berstandar yaitu air pasok dan buang dijadikan satu sehingga terjadi penumpukan limbah (P3UWL, 2023). Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim BKIPM Lampung Udang, Air, Sedimen dari Usaha Budidaya Udang di Rawajitu Timur terserang virus mulai dari AHPND (*Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease*), WSSV (*White Spot Syndrome Virus*) dan EHP (*Enterocytozoon Hepatopenaei*) (BKIPM, 2022). Sehingga penurunan produksi disebabkan oleh permasalahan lingkungan.

Permasalahan lingkungan ini terjadi karena akumulasi limbah dari aktifitas budidaya akan berpengaruh secara langsung terhadap kondisi habitat lingkungan udang hidup (Edhy et al., 2010). Sehingga, kondisi habitat yang tidak stabil akan cenderung membuat kapasitas daya dukung budidaya akan semakin menurun. Daya dukung budidaya yang menurun dicirikan dengan limbah budidaya yang tinggi, kualitas air yang

buruk, laju pertumbuhan yang menurun, serta banyaknya angka mortalitas udang (Parvathi dan Padmavathi, 2018). Permasalahan lingkungan yang terjadi membutuhkan peran pemerintah dalam penerapan konsep *blue economy* dalam budidaya udang secara berkelanjutan. Serta partisipasi masyarakat petambak yang ikut serta menerapkan konsep tersebut bagi keberlanjutan budidaya udang. Berdasarkan permasalahan yang ada maka perlu dilakukan pemetaan *stakeholder* dalam penerapan konsep budidaya udang berkelanjutan dengan sistem pengolahan limbah. Pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan mengisyaratkan melibatkan dan partisipasi *stakeholder* yang mapan dan interaktif (Duggan et al., 2013). Tujuan penelitian untuk memetakan *stakeholder* yang terlibat dalam penerapan konsep *blue economy* pada budidaya udang vaname di Kecamatan Rawajitu Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada bulan September di Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang (Gambar 1). Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang, Camat Rawajitu Timur, Penyuluh Perikanan Wilayah Kecamatan Rawajitu Timur, Ketua Perhimpunan Petambak Udang Wilayah Lampung (P3UWL), Ketua Koperasi Petambak Bumi Dipasena (KPBD), Mitra Yayasan Gajah Sumatera (Yagasu), Ketua Persaudaraan Perempuan Nelayan Seluruh Indonesia (PPNI) Wilayah Kecamatan Rawajitu Timur, fasilitator kemitraan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dan Pelaku Usaha Budidaya Udang Vaname. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memetakan *stakeholder* yang terlibat berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya. Tahapan-tahapan yang digunakan berdasarkan Eden dan Ackermann (1998)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Kecamatan Rawajitu Timur berada pada garis lintang 4°07'14.1" - 4°23'42.0" BT dan garis bujur 105°50'28.8" - 105°46'41.4"LS. Kawasan pertambakan di Kecamatan Rawajitu Timur merupakan Perkampungan Tambak Udang yang terdiri dari 16 Blok yakni Blok 00 s/d blok 15, dengan 8 Pemerintahan Kampung (desa) definitif yaitu Bumi Dipasena Abadi, Bumi Dipasena Sejahtera, Bumi Dipasena Makmur, Bumi Dipasena Mulya, Bumi Dipasena Jaya, Bumi

Dipasena Agung, Bumi Dipasena Utama, dan Bumi Dipasena Sentosa (Demografi Kecamatan Rawajitu Timur, 2022).

Populasi penduduk Kecamatan Rawajitu Timur berjumlah total 18.607 jiwa dengan pembagian jumlah laki-laki 9.891 jiwa sementara perempuan 8.716 jiwa. Mata pencaharian utama penduduk Kecamatan Rawajitu Timur yaitu Petambak sebanyak 85, 41% dari total mata pencaharian penduduk. Potensi pertambakan di Kabupaten Tulang Bawang cukup besar mencapai 64.200 Ha yang tersebar di sepanjang pantai timur Tulang Bawang, yang telah dimanfaatkan di wilayah Kecamatan Rawajitu Timur mencapai 16.250 ha dengan jumlah pembudidaya udang vaname sebanyak 6.500 jiwa (Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang, 2022). Potensi sumberdaya alam lahan yang cukup besar sehingga sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada usaha budidaya udang vaname.

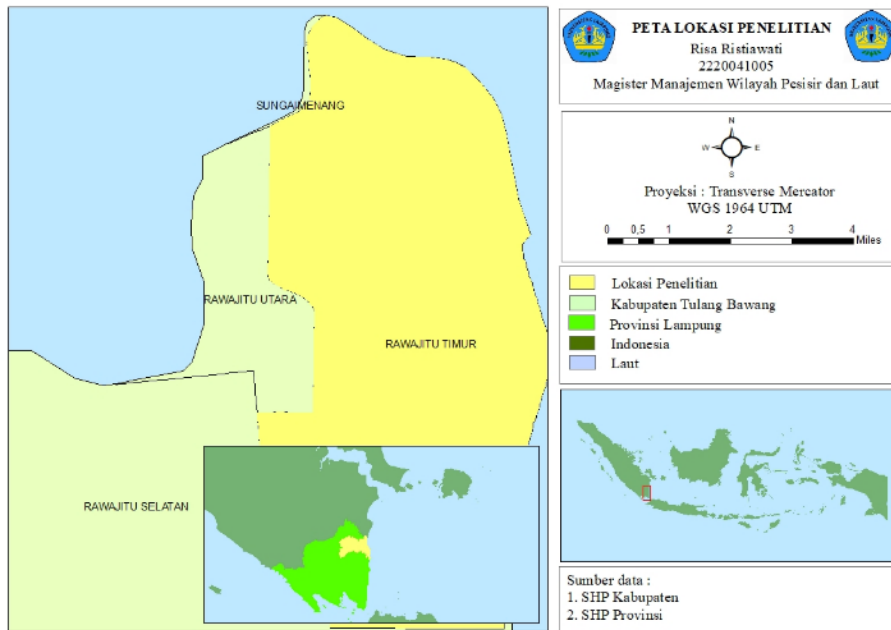
Udang vaname menjadi komoditas utama perikanan budidaya Kabupaten Tulang Bawang. Kecamatan Rawajitu Timur menjadi sentra perikanan budidaya dengan luas wilayah pertambakan 16.250 Ha, terdiri dari 17.760 petak tambak yang terdiri dari 14.609 petak adalah tambak produktif dan 3.151 petak non produktif. Produksi perikanan budidaya Kabupaten Tulang Bawang 48% bersumber dari budidaya di tambak dan udang vaname menjadi komoditas utama. Berdasarkan data produksi udang vaname Kecamatan Rawajitu Timur (Gambar 3.) menunjukkan bahwa produksi udang selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan pada Tahun 2022 sebesar 6.286 Ton. Penurunan produksi ini salah satunya disebabkan oleh penurunan kualitas lingkungan, sebagian besar petambak belum melakukan pengolahan limbah sisa hasil budidaya.

Stakeholder yang terlibat dalam penerapan konsep *blue economy* pada budidaya udang vaname di Kecamatan Rawajitu Timur berjumlah 21 *stakeholder* yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing (Gambar 4). Seluruh *stakeholder* tersebut mendukung terhadap kebijakan pemerintah dalam mengelola sumberdaya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.

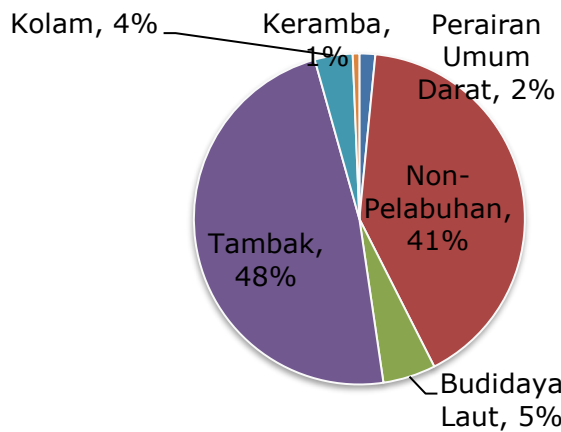
Tabel 1. Mata Pencaharian Penduduk Bumi Dipasena

Mata Pencaharian	Jumlah
Petambak	5651
Pedagang	223
PNS	119
Pekerjaan Lainnya	623

Sumber: Demografi Kecamatan Rawajitu Timur (2022)

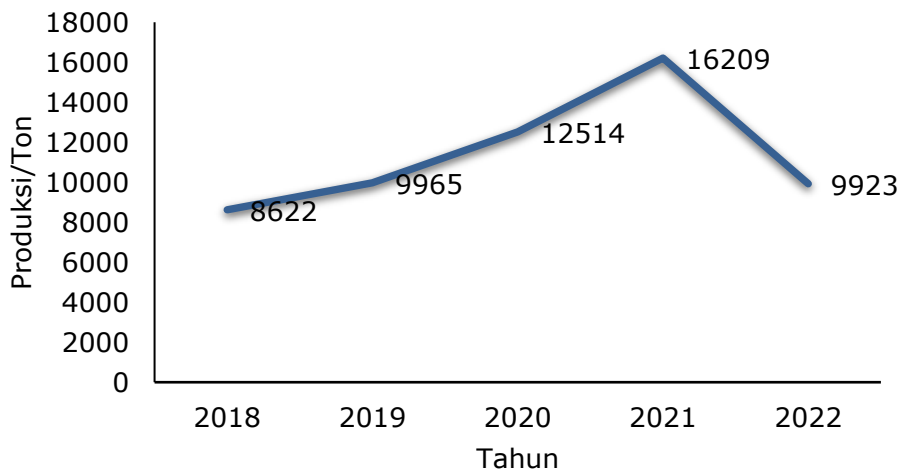


Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian



Gambar 2. Produksi Perikanan Tahun 2022

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang (2023)



Gambar 3. Produksi Udang Vaname Kecamatan Rawajitu Timur Periode 2018-2022

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang (2023)

Kebijakan tersebut berasal dari beberapa *stakeholder* yang membuat keputusan kebijakan. Menurut Mahfud *et al.*, (2015) *stakeholder* merupakan individu maupun kelompok organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat dalam suatu kegiatan program pembangunan yang sifatnya bisa mempengaruhi atau dipengaruhi atau bahkan keduanya baik positif atau negatif.

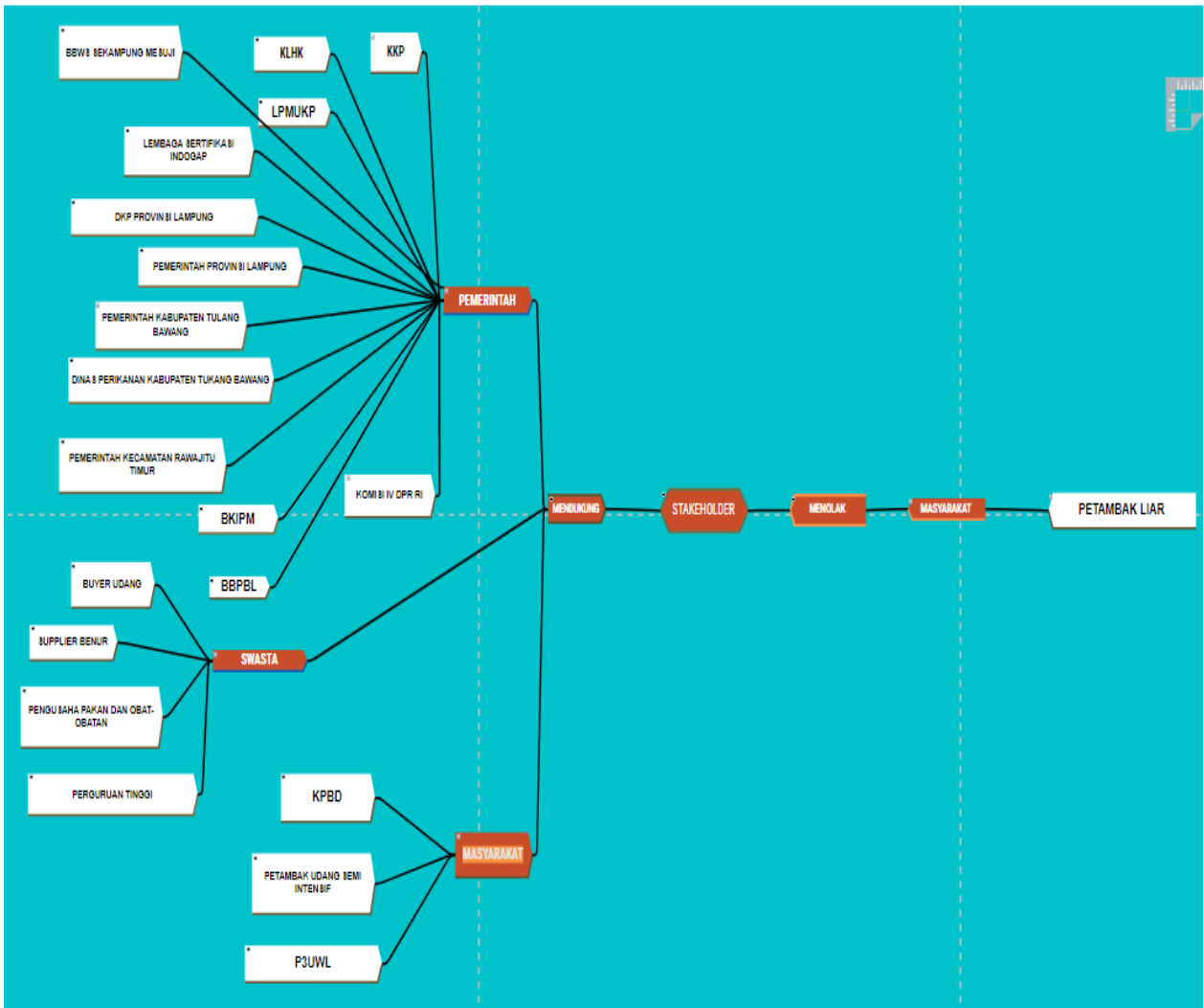
Stakeholder yang berada pada posisi *player* yaitu Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang. *Stakeholder* tersebut menjadi *player*, karena memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi. *Stakeholder* dengan kategori *player* tersebut merupakan pengawas sekaligus penyelenggara perumusan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh *stakeholder* lain akan dijalankan melalui koordinasi dengan semua pihak terkait dan saling bersinergi satu sama lain dalam pelaksanaan kebijakan program oleh *stakeholder* ini. Hal ini didukung oleh Wahyuni *et al.*, (2022) *stakeholder* yang aktif karena memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap keberhasilan pengelolaan ekosistem. Sejalan dengan pernyataan Sembiring *et al.*, (2010) bahwa pengelola yang mendapat kekuasaan secara legal selalu menempati posisi sebagai pemangku kepentingan utama.

Stakeholder dengan kategori *context setter* yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Perikanan (KLHK), Komisi IV DPR RI, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung (BBPBL), Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Pangan (BKIPM), *supplier* benur, *buyer* udang, perusahaan pakan dan obat-obatan, Perhimpunan Petambak Udang Wilayah Lampung (P3UWL), Koperasi Petambak Bumi Dipasena (KPBD), Yayasan Gajah Sumatera (Yagasu), Persaudaraan Perempuan Nelayan Seluruh Indonesia (PPNI) dan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). *Stakeholder* tersebut masuk dalam kategori *context setter* karena memiliki pengaruh yang tinggi dengan kepentingan yang rendah. Menurut Hartati *et al.*, (2014) sebagian *stakeholder context setter* memiliki kewenangan atas kebijakan yang dibuat dan memiliki kewenangan pengawasan.

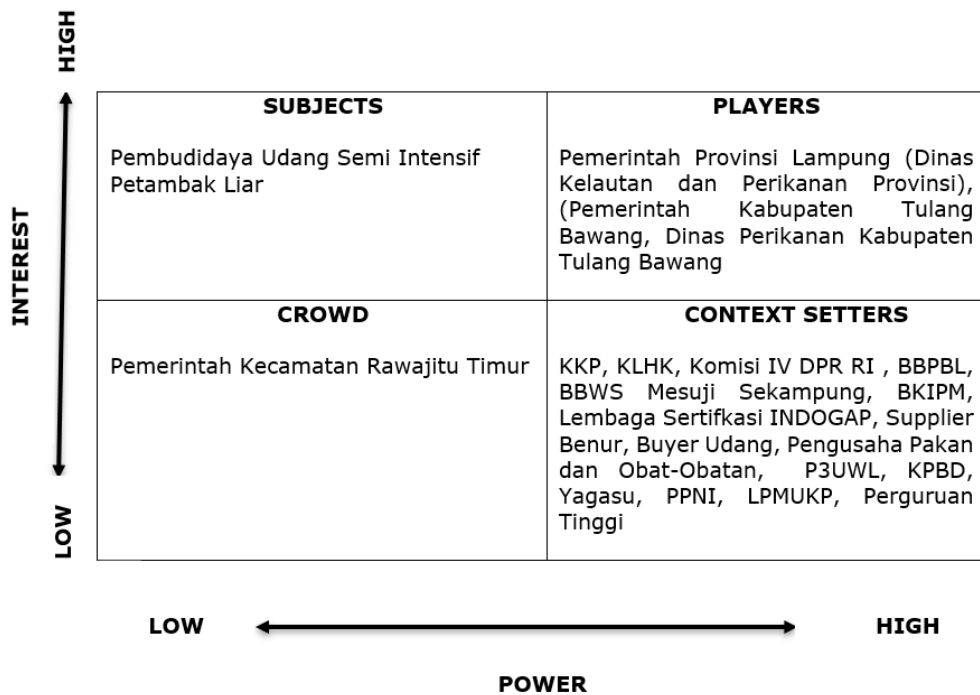
Kementerian Kelautan dan Perikanan terlibat karena Kecamatan Rawajitu Timur merupakan salah satu kawasan pertambakan udang terbesar di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang tinggi karena sebagian

besar masyarakat di Kecamatan Rawajitu Timur berprofesi sebagai pembudidaya udang, melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perannya sebagai penyedia dan pembuat peraturan kebijakan seperti Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan landasan hukum bagi upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara budidaya ikan yang baik, Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang pedoman sistem pembinaan pembesaran ikan yang baik, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2015-2035 yang mengatur pengelolaan ruang dan sumber daya alam secara berkelanjutan di wilayah Lampung, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang menempatkan pengembangan ekonomi hijau dan biru sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurut Widodo *et al.*, (2018) *stakeholder* kategori ini memiliki wewenang yang besar untuk membuat suatu kebijakan terkait memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan daerahnya.

Pemerintah pusat dan daerah bersama pihak-pihak terkait perlu melakukan dialog terkait upaya penerapan konsep *blue economy* pada budidaya udang vaname. Dialog merupakan kesepakatan bersama, pengelolaan dan pemanfaatan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pengelola. Hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan dan pembuatan keputusan serta pemecahan berbagai masalah (Pascoe *et al.*, 2009). Tiap *stakeholder* mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak lain untuk melakukan perubahan yang lebih efektif dan efisien (Cox *et al.*, 2009). *Stakeholder* terakhir sebagai *context setter* yaitu perguruan tinggi yang berperan sebagai konsultan terkait manfaat dan permasalahan dari program yang diberikan dari sudut pandang ilmu. Kelompok *context setters* sangat mungkin menjadi oposan atau minimal selalu mengintervensi (Purnama dan Sulastri 2014). Hubungan baik perlu dibina dengan kelompok *context setter* agar dapat berperan aktif mencapai tujuan (Husain *et al.* 2019).



Gambar 4. Stakeholder yang berperan pada Budidaya Udang di Kecamatan Rawajitu Timur



Gambar 5. Kuadran Power vs Interest Grid Stakeholder Penerapan Konsep Blue Economy pada Budidaya Udang Vaname di Kecamatan Rawajitu Timur

Kategori *stakeholder subject* memiliki kepentingan yang tinggi tetapi tidak memiliki pengaruh, *Stakeholder* tersebut pembudidaya udang semi intensif dan petambak liar. Pembudidaya udang merupakan masyarakat yang memiliki kepentingan besar dalam penerapan sistem budidaya berbasis ekosistem dan berkelanjutan serta merasakan manfaat dari penerapan konsep tersebut. Menurut Bibin et al., (2018) *subject* memiliki sedikit kapasitas untuk mengubah situasi tetapi dapat mempengaruhi orang/organisasi jika membuat aliansi, dan sebaliknya mereka dapat dipengaruhi oleh pemangku kepentingan lain.

Stakeholder berkategori *crowd* yaitu Pemerintah Kecamatan Rawajitu Timur. *Stakeholder* tersebut masuk dalam kategori *crowd* karena *stakeholder* ini tidak memiliki pengaruh dan kepentingan yang kuat. Dalam peranannya, *Stakeholder* ini hanya melakukan pembinaan kepada pembudidaya ikan terkait konsep pengelolaan perikanan berbasis ekosistem dan berkelanjutan dan berperan dalam bentuk kerjasama dan birokrasi yang dilakukan pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Menurut Widodo et al., (2018) *crowd* merupakan *stakeholder* dengan kepentingan dan pengaruh yang rendah. *Stakeholder* ini membutuhkan sedikit pengawasan dan evaluasi namun dengan prioritas yang rendah. Kelompok *crowd* perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan bersama untuk mencegah konflik atau krisis manajemen sehingga pengelolaan program dapat berjalan bersama-sama (Freeman et al., 2018).

Stakeholder yang saling berperan dan berpartisipasi aktif, mulai dari tahap pembuatan kebijakan, penentuan program yang akan di berikan, tahap pelaksanaan program dan sampai pada tahap monitoring dan evaluasi di lakukan oleh *stakeholder* terkait dengan harapan pembudidaya udang dapat menerapkan konsep budidaya yang berkelanjutan. Upaya dari penerapan konsep *blue economy* pada budidaya udang tersebut pasti terdapat kendala dan permasalahan. Permasalahan tersebut dapat berasal dari masyarakat yang masih belum akan pentingnya pengelolaan limbah sisa hasil budidaya dan pembudidaya udang yang belum paham akan pentingnya menjaga lingkungan untuk dapat mewujudkan budidaya udang yang berkelanjutan. Kolaborasi *stakeholder* dalam masih belum optimal, hal tersebut dikarenakan dengan tidak adanya kolaborasi lintas sektoral. Menurut Patminingtyas (2020) mengungkapkan bahwa

kolaborasi *stakeholder* adalah suatu bentuk kerjasama dan interaksi sosial dimana para pemangku kepentingan memiliki peran dalam pengambilan kebijakan dan sebagai aktor dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tresiana et al. (2022)., Febryano et al. (2015) juga mengatakan bahwa strategi pengelolaan akan terwujud dari adanya partisipasi dan kolaborasi semua *stakeholder*.

KESIMPULAN

Stakeholder berperan sebagai *players* adalah Pemerintah Provinsi Lampung, DKP Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang, yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang sangat kuat. *Stakeholder* yang berperan sebagai *context setter* yaitu Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komisi IV DPR RI, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Lembaga Sertifikasi INDOGAP, *Supplier* Benur, *Buyer* Udang, Pengusaha Pakan dan Obat, Perhimpunan Petambak Udang Wilayah Lampung, Koperasi Petambak Bumi Dipasena, Yayasan Gajah Sumatera, Persaudaraan Perempuan Nelayan Seluruh Indonesia, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, Perguruan Tinggi memiliki pengaruh yang besar tetapi kepentingan yang rendah. Peran *stakeholder* dengan kategori *subject* adalah pembudidaya udang yang memiliki kepentingan yang tinggi, tetapi tidak memiliki pengaruh yang kuat. *Stakeholder crowd* yaitu Pemerintah Kecamatan Rawajitu Timur yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Kerjasama lintas sektoral harus dilakukan, agar harapan dari pemerintah terhadap penerapan konsep *blue economy* atau budidaya udang berkelanjutan dapat diterapkan dalam menjaga lingkungan dengan tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pelatihan cara-cara pengolahan limbah sisa hasil budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, sehingga kegiatan budidaya udang vaname dapat *zero waste*.

REFERENSI

Cochrane, K.L. 2002. A fishery manager's guidebook Management Measures and

- Their Application. Italy: The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), FAO Fisheries Technical Paper No. 424.
- Bibin, M., Vitner, Y., & Imran, Z., 2018. Analysis of Stakeholder in the Development of Labombo Beach Sustainable Town in Palopo City. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. 31(1):62-71 DOI: 10.20473/mkp.V31I12018.62-71
- Cox, S.P. & Kronlund, A.R., 2008. Practical Stakeholder-Driven Harvest Policies for Groundfish Fisheries in British Columbia, Canada. *Journal of Fisheries Research* 94(3):224-237. DOI: 10.1016/j.fishres.2008.05.006
- Duggan, D.E., Farnsworth, K.D. & Kraak, S.B.M., 2013. Identifying Functional Stakeholder Clusters to Maximize Communication for The Ecosystem Approach to Fisheries Management. *Journal of Marine Policy*, 42:56-67. DOI: 10.1016/j.marpol.2013.01.023
- Eden, C. & Ackermann, F., 1998. Making Strategy: The Journey of Strategic Management. London: Sage Publication Ltd.
- Edhy, W.A., Azhary, K., Pribadi, J., & Chaerudin M.K., 2010. Budidaya udang putih (*Litopenaeus vannamei*. Boone, 1931). Jakarta: CV. Mulia Indah.
- Febryano, I.G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C. & Hidayat, A., 2015. Actor dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 12:125-142.
- Freeman, E.R., Civera, C., Cortese, D., & Fiandrino, S., 2018. Strategising Stakeholder Empowerment for Effective Co-Management Within Fishery-Based Commons. *British Food Journal*, 120(11): 2631-2644.
- Husain, A., Satria, A., Kusmana, C., & Eriyatno. 2019. Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Kota Gorontalo. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 9(4): 1041-1052pp.
- Parvathi, D., & Padmavathi P., 2018. Stocking density, survival rate and growth performance of *Litopenaeus vannamei* (boone, 1931) in different cultured shrimp ponds from Vetapalem, Prakasam District, Andhra Pradesh, India. *International Journal of Zoology Studies*. 3(2):179-183.
- Pascoe, S., Proctor, W., Wilcox, C., Innes, J., Rochester. W. & Dowling, N. 2009. Stakeholder Objective Preferences in Australian Commonwealth Managed Fisheries. *Journal of Marine Policy* 33:750-758.
- Patminingtyas, T.U., 2020. Kolaborasi Stakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Di Kampung Wolulas (Studi Kasus di RW 18, Kelurahan Turen, Kabupaten Malang). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Prayuda, R., & Sary, D.V. 2019. Strategi Indonesia Dalam Implementasi Konsep Blue Economy Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2): 46-64.
- Purbani, D., Damai, A.A., Yulius., Mustikasari E., Salim H.L., & Heriati A., 2016. Pengembangan Industri Perikanan Tangkap di Perairan Barat Sumatera Berbasis Ekonomi Biru. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(2):233-240.
- Purnama, R., & Sulastr., 2014. Analisis Model Kekuatan Stakeholder dalam Desain dan Implementasi Kebijakan UPI. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 5(2): 85-96.
- Rani, F. & Cahyasari, W., 2015. Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Transnasional*, 7 (1): 1914-1928.
- Sembiring, E., Basuni, S. & Soekmadi, R., 2010. Resolusi konflik pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten Teluk Wondama. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 16:84-91.
- Tresiana, N., Duadji, N., Febryano, I.G. & Zenitha, S.A., 2022. Saving mangrove forest extinction in Urban Areas: Will government interventions help international *Journal of Sustainable Development and Planning*, 17:375-384.
- Wahyuni, T., Karmilasanti, Indriyanti S.Y., & Abdurrachman. 2022. Involvement and roles of stakeholder in Mahakam delta Management to support mitigation and adaption effort of climate change in East Kalimantan. International Conference on Tropical Wetland Biodiversity and Conservation. IOP Publishing.
- Widodo, M.L., Soekmadi, R. & Arifin, H.S., 2018. Analisis stakeholders dalam pengembangan ekowisata di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 8:55-6